

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 99 TAHUN 2012 TERHADAP KEBIJAKAN PENGETATAN
PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA KORUPSI SEBAGAI
BENTUK PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DI INDONESIA**

Analisa Ilmiah, Abdul Madjid, S.H., M.H., Eny Harjati, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

E-mail: analisailmiah3@gmail.com

ABSTRAK

Kebijakan pengetatan syarat pemberian remisi koruptor yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 merupakan salah satu kebijakan yang memberikan dampak yang baik terhadap upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Tetapi pengetatan syarat remisi tersebut telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang memberikan dasar hak narapidana untuk memperoleh remisi dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu, untuk mencapai suatu tujuan yang baik harus dilakukan penyempurnaan terhadap aturan yang ada yaitu dengan merevisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, agar pengaturan syarat remisi yang ada dalam Peraturan Pemerintah telah sesuai dengan apa yang terdapat dalam Undang-undang tentang Pemasyarakatan dan sesuai dengan sistem pembinaan dalam sistem pemasyarakatan. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implikasi yuridis dari adanya kebijakan pengetatan syarat pemberian remisi koruptor akan membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan dapat mencegah pelaku korupsi potensial. Sulitnya penegak hukum dalam memberantas korupsi, *justice collaborator* merupakan salah satu upaya untuk membantu penegak hukum dalam mengungkap kasus korupsi dan sebagai bentuk sistem pembinaan dalam sistem pemasyarakatan. Adanya syarat menjadi *justice collaborator* dalam pemberian remisi narapidana korupsi juga sebagai salah satu langkah preventif dan represif. Adapun saran yang diberikan Penulis yaitu revisi Undang-undang tersebut secara holistik dan komprehensif, sehingga diharapkan implikasi yuridisnya akan memenuhi rasa keadilan.

Kata Kunci: Remisi, *Justice Collaborator*, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

Policy of tightening conditions of granting remission corruptor arranged in Government Regulation No. 99 Year 2012 is one of the policies which give effect to the efforts to combat criminal acts of corruption in Indonesia. But the tightening of conditions of remission would have been contrary to the Act No. 12 Year 1995 concerning basic rights that provides Correctional inmates to earn remission and the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. Therefore, to achieve a good purpose to do the refinement of the existing rule is to revise Act No. 12 Year 1995 concerning Corrections, so that setting the terms of the remission that is in government regulations in accordance with what has been found in Correctional legislation and in accordance with a system of coaching in the correctional system. The research was conducted by juridical-normative. The results of this research was concluded that the juridical implications of the existence of a policy of tightening conditions of granting remission corruptor will help the process of law enforcement against criminal acts of corruption and can prevent potential corruption offenders. The difficulty of law enforcement in anti-corruption, justice collaborator is one effort to help law enforcement in exposing corruption cases and as a form of system construction in the correctional system. The existence of these terms becomes collaborator in granting remission justice convicts of corruption as well as one of the preventive and repressive measures. As for the advice given the author, namely the legislation revision holistically and comprehensively, so that the expected juridical implications will meet the sense of Justice.

Keywords: Remission, Justice Collaborator, Government Regulation No. 99 Year 2012, Act No. 12 Year 1995, Countermeasures the criminal acts of corruption.

PENDAHULUAN

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dari proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan, seperti sosial, politik, ekonomi, keamanan, dan budaya telah membawa dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat.¹ Kejahatan tersebut salah satunya adalah perbuatan korupsi. Perbuatan korupsi sangat sulit untuk disembuhkan maka negara mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan tindak pidana yang luar biasa.

Kejahatan korupsi di Indonesia sudah menjadi masalah yang serius dan bisa dikatakan tindak pidana yang membudaya. Pemberantasan tindak pidana korupsi selalu di usahakan upaya penanggulangannya sejak era reformasi yang sudah diatur dan tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berawal dari

¹ Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm 1.

ketetapan MPR RI No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme, ketetapan ini selanjutnya diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Kemudian dilengkapi dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah di revisi dan di sempurnakan melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Tetapi dirasa pemberantasan korupsi ini tidak berjalan dengan baik selain dari penegak hukum juga pada tahap akhir dari sistem pemidanaan yaitu sistem pembinaan dalam sistem pemasyarakatan kurang efektif. Negara berhak untuk memperbaiki setiap pelanggar hukum yang melakukan suatu tindak pidana melalui sesuatu pembinaan, agar pembinaan dapat berjalan dengan baik, maka salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan cara pemberian remisi kepada narapidana yang merupakan salah satu hak narapidana termasuk narapidana korupsi.

Hak remisi narapidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (untuk selanjutnya disebut Undang-undang tentang Pemasyarakatan). Setiap narapidana korupsi yang menginginkan haknya tersebut terpenuhi harus memenuhi syarat substantif dan administratif. Syarat tersebut diatur dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (untuk selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012). Khusus untuk narapidana korupsi terdapat aturan syarat yang lebih khusus yang harus dipenuhi yaitu yang terdapat dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang berbunyi:

- a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya (*justice collaborator*);
- b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.

Pengetatan syarat pemberian remisi koruptor menimbulkan suatu keresahan yang luar biasa dari narapidana dan beberapa keluarga narapidana khususnya yang keberatan dengan munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, dan

peraturan ini tidak berlaku surut. Pemberian remisi kepada narapidana di lembaga pemasyarakatan merupakan awal tercapainya suatu tujuan sistem pemasyarakatan dan sebagai salah satu motivasi bagi narapidana untuk membina dirinya sendiri. Apabila narapidana telah menjalani kewajibannya sebagaimana mestinya, maka ia berhak untuk mendapatkan remisi sepanjang persyaratannya telah terpenuhi.²

Korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*)³ yang menyengsarakan rakyat, menindas hak asasi rakyat, melumpuhkan kepastian dan keadilan hukum, menghambat perkembangan demokrasi yang sebenarnya tak patut untuk mendapatkan remisi jika dilihat dari sudut pandang kejahatan korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa meskipun remisi tersebut merupakan hak setiap narapidana. Oleh sebab itu, pengetatan pemberian remisi koruptor ini merupakan langkah konkret agar narapidana korupsi tidak serta merta mudah untuk mendapatkan remisi.

Melihat konstitusi kita yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Hak Asasi Manusia ada yang dapat disimpangi dan ada yang tidak. Melihat dari sisi remisi yang merupakan hak narapidana, namun hak memperoleh remisi ini dapat dikesampingkan sesuai konstitusi. Hak narapidana korupsi memperoleh remisi dapat disimpangi dengan menerapkan syarat yang diperketat dan pembatasan dalam peraturan bukan penghapusan terhadap remisi. Remisi harus diberikan suatu dasar batasan-batasan apa yang harus dipenuhi oleh narapidana korupsi, sebab kejahatan korupsi harus diselesaikan dengan upaya yang luar biasa, dengan cara sistemik-struktural adanya pembenahan birokrasi sehingga lubang-lubang yang dapat dimasuki tindakan-tindakan korup dapat ditutup.⁴

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang hendak diteliti oleh Penulis adalah syarat pemberian remisi koruptor yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 apakah bertentangan dengan

² CI Harsono, **Sistem Baru Pembinaan Narapidana**, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm 25.

³ Romli Atmasasmita, **Korupsi, Good Governance & Komisi Anti Korupsi di Indonesia**, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002, hlm 9.

⁴ Wahyudi Kumorotomo, **Etika Administrasi Negara**, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hlm 217.

pengaturan pemberian remisi pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan implikasi yuridis kebijakan pengetatan pemberian remisi koruptor terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan, mensistematisasi, dan mensinkronisasi syarat pemberian remisi terhadap koruptor yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan atau tidak bertentangan dengan pengaturan pemberian remisi pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, dan menganalisis implikasi yuridis kebijakan pengetatan pemberian remisi bagi narapidana korupsi terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Diharapkan penelitian ini mampu menjadi bahan pertimbangan dalam membenahi peraturan yang ada untuk tujuan yang baik dalam sistem pemasarakatan terkait permasalahan di atas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dimana Penulis melakukan penelitian yang sumber datanya berasal dari norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang ada dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif atau kepastakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum.⁵ Penggunaan jenis penelitian yuridis-normatif dalam penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek yakni dari aspek yuridis penelitian ini mencoba mengkaji hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur pengetatan syarat pemberian remisi koruptor terhadap hak remisi yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan kaitannya dengan penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sedangkan dari aspek normatif yakni mencoba menganalisis permasalahan yang ada pada peraturan atau norma tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm 14.

Penelitian ini mengungkapkan kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 terhadap Undang-undang tentang Pemasyarakatan yang mengatur hak remisi. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menjalankan segala ketentuan dari Undang-undang tentang Pemasyarakatan yang secara tegas meminta untuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, artinya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak boleh keluar dari aturan norma dasar yang diatur dalam Undang-undang tentang Pemasyarakatan tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 secara hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-undang tentang Pemasyarakatan. Khusus pada pengaturan syarat pemberian remisi koruptor yang diatur dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini, seharusnya lebih diperjelas di dalam Undang-undang tentang Pemasyarakatan klausula mengenai hak narapidana kejahatan luar biasa khususnya korupsi untuk mendapatkan remisi, mengingat hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pengaturan Pemberian Remisi Koruptor Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Terhadap Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Remisi merupakan hak narapidana. Undang-undang Pemasyarakatan telah memberikan suatu hak bagi narapidana yang salah satunya adalah hak untuk mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-undang tentang Pemasyarakatan. Setiap narapidana berhak untuk mendapatkan pengurangan hukuman (remisi) apabila telah memenuhi syarat yang ada yang diatur dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Khusus untuk narapidana korupsi juga harus memenuhi Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Penerapan aturan pemberian remisi pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 merupakan salah satu upaya terpenuhinya asas legalitas dalam hukum pidana. Menurut penulis bahwa adanya pengaturan pengetatan syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak melihat dari sisi hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang telah diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Jika kita melihat dari sudut hierarki peraturan perundang-undangan dan sistem pembinaan pemasyarakatan yang harus memenuhi asas-asas yang ada dalam membina hak warga binaan pemasyarakatan, maka pengaturan syarat pemberian remisi koruptor dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 5 Undang-undang tentang Pemasyarakatan.

Pengaturan syarat pemberian remisi koruptor dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dianggap bertentangan karena substansinya yang terdapat dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah tersebut merupakan norma baru yang bertentangan dengan filosofi, tujuan, visi dan misi Undang-undang tentang Pemasyarakatan itu sendiri yang melarang adanya perlakuan dan pelayanan diskriminatif terhadap narapidana. Sedangkan disini secara jelas bahwa munculnya revisi Peraturan Pemerintah yang baru ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menimbulkan diskriminasi bagi masyarakat dan narapidana karena adanya perbedaan syarat pemberian remisi yang signifikan dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006.

Syarat pemberian remisi koruptor yang terdapat dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini apabila dicermati lebih dalam arti dari syarat pemberian remisi ini juga bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Seharusnya apabila Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 ini di revisi dan dengan munculnya peraturan yang baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, maka peraturan inilah yang dipergunakan agar memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, artinya pembinaan warga pemasyarakatan harus memenuhi asas-asas sistem pembinaan pemasyarakatan. Apabila Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini tidak berlaku surut, dimana untuk narapidana korupsi yang lama yang dihukum sebelum tanggal 12 November 2012 pemberian remisi tetap mengacu pada aturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, maka untuk pemberian remisi narapidana korupsi yang apabila masa penahanannya masih lama atau dalam jangka waktu yang masih panjang, untuk ke depannya yaitu 1 (satu) tahun setelah Peraturan

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dibuat, maka diberlakukan peraturan yang baru ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 demi terpenuhinya rasa keadilan dan sistem pembinaan masyarakat sebagaimana yang telah diatur oleh perundang-undangan. Pembatasan pengetatan pemberian remisi juga bertentangan dengan Pasal 28 J UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Syarat pengetatan pemberian remisi koruptor apabila tetap dipertahankan dan tidak mengubah aturan dari Undang-undang tentang Masyarakat, maka Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dikatakan telah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-undang tentang Masyarakat. Ini berarti dapat dikatakan bahwa kita melanggar konstitusi yang seharusnya mewajibkan kita semua menaati hierarki peraturan perundang-undangan. Hal tersebut juga dapat dikatakan bahwa Undang-undang tentang Masyarakat bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, karena seharusnya dalam melakukan pembatasan hak asasi narapidana kejahatan luar biasa khususnya korupsi, pengaturan khusus hak remisi koruptor juga harus diatur dalam Undang-undang tentang Masyarakat secara rigid, bukan hanya sekedar terdapat syarat pemberian remisi koruptor yang diperketat dari aturan sebelumnya yang keluar dari norma dasar Undang-undang tentang Masyarakat.

Menurut penulis memang benar Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini menjalankan amanat dari Undang-undang tentang Masyarakat, dimana dalam Peraturan Pemerintah ini membatasi adanya pemberian remisi bagi koruptor dengan memperketat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana korupsi. Tetapi justru apa yang dituangkan dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini bertentangan dengan filosofi, tujuan, visi dan misi dari Undang-undang tentang Masyarakat itu sendiri. Apabila diinginkan suatu pembatasan pengetatan pemberian remisi koruptor yang tertuang dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 99

Tahun 2012, pembatasan hak asasi tersebut hanya dapat dilakukan dengan Undang-undang tentang Pemasyarakatan dan tidak boleh dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Penulis menyarankan, apabila terdapat pembatasan syarat pemberian remisi koruptor, maka hak narapidana berupa remisi yang diatur dalam Undang-undang tentang Pemasyarakatan inipun juga harus diperbaiki klausul aturannya, sehingga terjadi harmonisasi antara Undang-undang tentang Pemasyarakatan yang mengatur hak remisi bagi setiap narapidana dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur selebihnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap narapidana yang akan mendapatkan remisi. Berikut tabel klausul perubahan pada Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-undang tentang Pemasyarakatan:

Tabel 1.
Klausul Perubahan pada Pasal 14 ayat (1) huruf i
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Aturan yang ada	Aturan yang seharusnya
Pasal 14 (1) Narapidana berhak: <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran; d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; e. menyampaikan keluhan; f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; k. mendapatkan pembebasan ber- 	Pasal 14 (1) Narapidana berhak: <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran; d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; e. menyampaikan keluhan; f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) yang dibedakan antara: <ol style="list-style-type: none"> ke-1. narapidana yang melakukan tindak pidana te-

<p>syarat;</p> <p>l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan</p> <p>m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>rorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;</p> <p>ke-2. narapidana selain yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i ke-1.</p> <p>j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;</p> <p>k. mendapatkan pembebasan bersyarat;</p> <p>l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan</p> <p>m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>
--	---

Sumber: *Bahan Hukum Primer, diolah Penulis, 2013*

Dengan adanya pengaturan yang jelas seperti tabel klausul perubahan diatas, maka pengaturan lebih lanjut yang diberikan oleh Undang-undang tentang Pemasyarakatan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini menjadi sinkron antara aturan yang ada dengan aturan lebih lanjut yang mengaturnya. Sehingga perubahan syarat pemberian remisi telah sejalan dengan maksud dari diberikannya hak remisi bagi narapidana dalam Undang-undang tentang Pemasyarakatan dan aturan syarat memperoleh remisi koruptor dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Implikasi Yuridis Kebijakan Pengetatan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Remisi menjadi salah satu hak yang paling ditunggu-tunggu oleh setiap narapidana termasuk narapidana korupsi, sebab remisi merupakan hak bagi setiap narapidana yang merupakan mata rantai dari suatu proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan. Untuk narapidana korupsi dalam mendapatkan remisi cukup sulit langkahnya karena harus memenuhi persyaratan yang ada dalam Pasal 34 dan syarat yang telah diperketat dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, karena dianggap untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat sebagai salah satu tujuan hukum.

Jika dilihat dari sudut pandang teori tujuan hukum yaitu teori etis, maka salah satu syarat pengetatan pemberian remisi koruptor ini telah memenuhi rasa keadilan. Menciptakan keadilan berarti memberikan apa yang menjadi hak setiap orang. Diberlakukannya syarat yang lebih ketat terhadap remisi koruptor ini telah sesuai dengan rasa keadilan. Setiap perkara harus dipertimbangkan secara khusus agar tercipta keadilan, salah satunya tindak pidana korupsi yang harus dipertimbangkan dalam memberikan pengurangan masa pidana, karena koruptor seharusnya tak pantas mendapatkan pengurangan masa pidana, tetapi karena kita menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan sistem pemasyarakatan, maka hak remisi yang merupakan mata rantai dari suatu proses pembinaan berhak didapatkan oleh setiap narapidana termasuk narapidana korupsi dengan memberlakukan syarat yang lebih ketat dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara simultan, menyeluruh dan berlanjut. Berbagai faktor yang perlu diperhatikan untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi harus dipelajari dengan seksama yang tidak hanya dapat sebatas teori, melainkan berdasarkan fakta yang dirasakan dan ditemui di tengah-tengah masyarakat. Pengetatan syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi sangat mendukung upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia, dan tidak terlepas harus menerapkan prinsip dan asas *good goverment* dan *good governance* agar kejahatan korupsi banyak yang terungkap dan dapat meminimalisir terjadinya koruptor-koruptor potensial, sehingga negara Indonesia menjadi negara yang bersih, bebas dari korupsi.

Terdapat teori kebijakan penanggulangan kejahatan, diantaranya yaitu pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan, kesejahteraan masyarakat, dan perlindungan masyarakat yang bersifat immateriil terutama nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran, keadilan dan dilakukan dengan pendekatan integral, ada keseimbangan antara sarana penal dan nonpenal. Jika dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana nonpenal karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan atau kelemahan yaitu bersifat tidak struktural fungsional, lebih bersifat represif, dan harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi.

Ada beberapa tahap apabila menggunakan sarana penal yang termasuk dalam kebijakan kriminal yaitu:⁶

1. Tahap formulasi atau kebijakan legislatif
2. Tahap aplikasi atau kebijakan yudikatif
3. Tahap eksekusi atau kebijakan eksekutif

Dari beberapa tahap di atas, apabila menggunakan tahap formulasi, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak atau penerap hukum tetapi juga tugas aparat pembuat hukum yaitu aparat legislatif. Bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari kebijakan kriminal, karena itu kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Upaya untuk menangkal korupsi yang salah satunya dengan cara struktural sistemik yaitu dimana korupsi bersumber dari kelemahan yang terdapat pada sistem politik dan sistem administrasi negara dengan birokrasi sebagai perangkat pokoknya. Untuk itu harus dilakukan upaya untuk mendayagunakan segenap suprastruktur politik maupun infrastruktur dan pada saat yang bersamaan membenahi birokrasi, sehingga celah untuk korupsi dapat ditutup.⁷ Dalam pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus ditempuh dengan kebijakan

⁶ Barda Nawawi Arief, **Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm 79.

⁷ Herwan, **Korupsi dan Dampaknya**, (*online*), <http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id>, (12 September 2013).

integral atau sistemik yaitu adanya keterpaduan antara kebijakan penanggulangan kejahatan dengan keseluruhan kebijakan pembangunan sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya, antara pidana atau tindakan dan seluruh masyarakat yang harus dibangun sedemikian rupa agar sehat dari faktor-faktor kriminogen, serta adanya keterpaduan antara sarana penal dan nonpenal.

Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur nonpenal lebih menitik beratkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Upaya nonpenal yang lebih bersifat tindakan pencegahan ini, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

Dari adanya berbagai uraian teori kebijakan penanggulangan kejahatan di atas, ada 2 (dua) hal yang perlu dilakukan dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, yaitu:⁸

1. Penindakan

Penindakan artinya semua pelaku tindak pidana korupsi yang sudah terjadi harus di adili tanpa pandang bulu. Untuk itu peran serta masyarakat dituntut untuk membuka dan mengadukan kasus-kasus tersebut. Selanjutnya mendesak instansi penyidik dan penuntut umum untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian, mengawasi jalannya peradilan (*judicial watch*) agar dapat berlangsung dengan jujur dan adil.

2. Pencegahan

Seluruh anggota masyarakat harus berupaya mencegah terjadinya kasus-kasus korupsi. Harus disadari bahwa korupsi terjadi adakalanya juga karena diprakarsai oleh masyarakat. Guna memasyarakatkan pencegahan korupsi itu harus dilakukan penyadaran masyarakat melalui kampanye antikorupsi, menumbuhkan budaya malu korup, dan melakukan tindakan-tindakan terhadap koruptor melalui adat dan budaya setempat.

Dengan adanya penindakan dan pencegahan dalam memberantas tindak pidana korupsi, upaya yang diperlukan yaitu adanya suatu agenda dan prioritas

⁸ Darwan Prinst, **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002, hlm 13-14.

yang jelas, seperti dengan memberikan sanksi yang tegas dan berat kepada pelakunya. Di samping itu, perlu juga dilakukan kampanye kepada masyarakat agar memandang tindak pidana korupsi sebagai penyakit sosial sehingga menimbulkan rasa tidak aman bagi para koruptor dengan kemungkinan mereka akan tertangkap, di adili, dan di jatuhi hukuman yang sangat berat. Hal yang harus diperhatikan dalam menanggulangi korupsi di Indonesia adalah bukan ancaman pidana yang luar biasa beratnya yang diutamakan, tetapi sistem manajemen negara yang rawan korupsi harus ditanggulangi lebih dahulu sebelum mengambil tindakan represif.⁹

Menurut Penulis, pada dasarnya sistem preventif lah yang harus diutamakan daripada sistem represif. Apa yang sudah terjadi tidak akan mungkin dipulihkan kembali seperti semula. Pentingnya keikutsertaan rakyat dalam memerangi korupsi, dimulai dengan meningkatkan kesadaran hukum, pendidikan, dan penerangan tentang bahaya yang akan terjadi jika korupsi tetap meluas.

Selain upaya preventif dan represif di atas, sasaran dalam upaya penanggulangan kejahatan utamanya untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dilakukan dengan cara:

1. Abolisionis

Dengan menggunakan cara abolisionis, korupsi di asumsikan sebagai suatu kejahatan yang harus diberantas dengan terlebih dahulu menggali sebab-sebabnya dan penanggulangan di arahkan pada usaha menghilangkan sebab-sebab tersebut.¹⁰ Pelaku tindak pidana korupsi melakukan korupsi dengan sebab hanya untuk memperkaya dirinya sendiri.

Adanya kebijakan pengetatan pengaturan remisi koruptor sangat mendukung dengan cara penanggulangan korupsi melalui abolisionis. Apabila hak remisi koruptor ini tidak diperketat, narapidana tidak akan semakin jera dalam menjalani pemidanaan dan proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dirasa tidak mempunyai satu tujuan yang pasti untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia, karena narapidana dapat dengan mudah menikmati pengurangan hukuman yang

⁹ Jur. Andi Hamzah, **Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 5.

¹⁰ Herwan, loc.cit.

seharusnya pemidanaan harus ia jalani sepenuhnya karena perbuatan yang telah ia perbuat sendiri.

2. Moralis

Faktor penting dalam persoalan korupsi adalah faktor sikap dan mental manusia. Cara ini dilakukan secara umum melalui pembinaan mental dan moral, penyuluhan keagamaan, etika, dan hukum.¹¹ Dengan adanya pembinaan mental dan moral, penyuluhan keagamaan, etika, dan hukum dapat mencegah perbuatan yang tidak baik yang menyengsarakan masyarakat dan negara yaitu korupsi. Manusia dengan dibekali moral yang baik, dalam menjalankan segala hal tidak akan pernah merasa tidak puas sehingga dapat menutup kemungkinan terjadinya tindakan korupsi.

Ada tiga hal yang memicu terjadinya korupsi, diantaranya:

1. Sistem pemerintahan atau negara yang memberi peluang untuk korupsi;
2. Rendahnya moralitas dan kesadaran masyarakat; dan
3. Tidak ada kontrol yang ketat dan serius baik dari warga masyarakat maupun yang berwenang.

Oleh sebab itu, untuk menekan terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia, ketiga hal di atas yang memicu terjadinya korupsi harus segera ditangani. Rendahnya moralitas dan kesadaran masyarakat salah satu yang memicu terjadinya korupsi harus ditangani dengan cara moralis, sehingga dapat menekan terjadinya korupsi karena merupakan langkah preventif sedini mungkin.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di implementasikan dengan berbagai strategi pemberantasan, yaitu strategi preventif, strategi detektif, dan strategi represif. Strategi preventif menekankan pada pencegahan jika ada indikasi korupsi di satu instansi. Strategi detektif merupakan upaya mendeteksi secara langsung di lapangan bila ada kemungkinan terjadinya korupsi. Deteksi ini dilakukan oleh para auditor, aparat Kejaksaan, kepolisian, dan masyarakat serta pejabat tinggi. Strategi represif merupakan upaya konkrit pemberantasan korupsi secara tegas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (untuk selanjutnya di singkat KPK). Namun praktik korupsi semakin merajalela, kuantitas dan kualitasnya pun

¹¹ Ibid.

semakin meningkat.¹² Sekalipun telah banyak agenda dan prioritas yang jelas seperti yang diuraikan di atas, tetapi tindak pidana korupsi sangat sulit untuk diperangi akibat ulah koruptor yang begitu canggihnya dalam beraksi.

Oleh karena itu, dengan adanya pengetatan syarat pemberian remisi koruptor yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menjadi salah satu bentuk untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia. Ini berarti dapat dikatakan Pemerintah telah melakukan satu hal atau kebijakan kontrol yang ketat dan serius, karena tidak adanya kontrol yang ketat dan serius baik dari warga masyarakat maupun yang berwenang dapat memicu terjadinya korupsi.

Implikasi yuridis dari adanya kebijakan pengetatan pemberian remisi koruptor terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia yaitu apabila narapidana korupsi memenuhi syarat yang ada dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 untuk mendapatkan remisi, maka syarat pada huruf a dan b merupakan langkah preventif dan represif di dalam mengungkap kasus-kasus korupsi di Indonesia dan dapat memudahkan penegak hukum untuk mengungkap kasus-kasus korupsi serta menghukum para koruptor di Indonesia. Banyaknya jumlah kasus korupsi besar yang berhasil diungkap KPK juga tak lepas dari peranan seorang *justice collaborator*.

Implikasi yuridisnya apabila syarat bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya atau menjadi *justice collaborator* ini terpenuhi oleh narapidana korupsi, maka akan membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia dan dengan persyaratan yang begitu berat ini dapat mencegah pelaku-pelaku korupsi potensial. Seorang narapidana harus siap dan tegas dalam menjadi *justice collaborator* untuk membongkar tindak pidana korupsi yang dilakukannya dan dapat menjelaskan fakta hukum tindak pidana korupsi yang bisa di jerat serta secara maksimal dimungkinkan tahu dana kerugian negara yang bisa dilacak untuk dikembalikan kepada negara yang sebelum diputus oleh pengadilan. Bukan hanya sekedar diatur syarat yang berbunyi bersedia bekerja sama dengan penegak hukum atau menjadi *justice collaborator*.

¹² Masdar F. Mas'udi, J. Suyuthi Pulungan, dkk, **Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama, Mewacanakan Fikih Anti Korupsi**, Gama Media, Yogyakarta, 2006, hlm 211.

Jika hanya syarat tersebut yang ada dan tidak ada aturan yang lebih konkret sebagaimana diuraikan di atas, maka pengurangan hukuman akan sia-sia jika diberikan kepada narapidana korupsi yang seyogyanya para koruptor lebih baik di hukum akibat perbuatannya yang sudah menyengsarakan masyarakat dan negara.

Syarat pengetatan pemberian remisi koruptor menjadikan suatu upaya represif yang bertujuan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana korupsi potensial di Indonesia. Dengan adanya syarat *justice collaborator*, maka para koruptor yang terjerat pun semakin banyak dan syarat pengetatan pemberian remisi ini menjadi suatu upaya preventif timbulnya koruptor potensial, karena masyarakat pasti berfikir bahwa jika ia akan melakukan tindakan korupsi, maka hidupnya tidaklah nyaman karena adanya pembenahan penegakan hukum dalam mengatasi kasus korupsi dan sulitnya menghirup udara bebas jika ia sudah berada dalam tahanan menjalani proses pemidanaan akibat aturan yang lebih diperketat.

Dalam melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi membutuhkan langkah konkret yaitu upaya yang luar biasa, salah satunya dengan cara kebijakan penghentian remisi bagi koruptor ataukah aturan syarat pemberian remisi yang lebih diperjelas. Jika penghentian remisi koruptor ini dirasa tidak mungkin sebab remisi merupakan mata rantai dari suatu proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dan merupakan hak setiap narapidana, maka aturan syarat pemberian remisi dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b ini harus diperjelas. Seorang narapidana yang bersedia menjadi *justice collaborator* harus mengetahui terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak lain terkait tindak pidana korupsi yang dilakukannya yang dapat di jerat pidana dengan dua alat bukti, misalnya seorang narapidana yang harus memenuhi syarat menjadi *justice collaborator* minimal mengetahui 75% kasus yang akan dibongkar. Jadi, pemberian remisi ini tidak hanya sebagai obralan saja dan dapat menutup peluang remisi menjadi komoditas.

Sedangkan syarat pada huruf b yaitu telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini secara jelas harus dipenuhi oleh setiap narapidana yang ingin mendapatkan haknya berupa pengurangan hukuman atau remisi, dengan narapidana membayar lunas denda dan uang pengganti, maka

salah satu tujuan represif atau penanggulangan korupsi pun dapat terpenuhi karena uang negara kembali. Ganti kerugian negara inilah yang harus dipenuhi oleh setiap narapidana. Sehingga secara konseptual, pemberlakuan pengetatan syarat pemberian remisi koruptor terhadap proses pemidanaan narapidana dapat dikatakan lebih mampu memenuhi tujuan pemidanaan secara holistik dan dapat menanggulangi terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kebijakan pengetatan pemberian remisi bagi narapidana korupsi yang membawa implikasi yuridis terhadap proses penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia ini perlu adanya tindak lanjut peraturan pelaksanaan. Oleh karena itu, perlu adanya teori kebijakan penanggulangan kejahatan yang melandasinya dengan adanya tahap formulasi atau kebijakan legislatif yang merupakan tahap paling strategis dari kebijakan penal. Terlebih dengan munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang banyak menimbulkan keresahan baik dari narapidana maupun masyarakat, sehingga perlu perbaikan dari Undang-undang yang mengatur tentang hak remisi narapidana tersebut yaitu Undang-undang tentang Pemasyarakatan, meskipun pada Undang-undang tersebut diperjelas bahwa ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah, tetapi Peraturan Pemerintah yang tidak berlaku surut ini banyak menimbulkan polemik karena Peraturan Pemerintah ini memuat syarat memperoleh remisi yang bertentangan dengan norma dasar dari Undang-undang tentang Pemasyarakatan. Alangkah baiknya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang harus direvisi terlebih dahulu.

Apabila narapidana dengan mudahnya mendapat pengurangan hukuman, bagaimana negara Indonesia dapat terbebas dari korupsi dan narapidana akan cenderung berpikiran bahwa jika korupsi itu sistem pemidanaan atau hukuman penjaranya ringan selain juga hukuman yang diputus oleh Hakim pun ringan. Oleh sebab itu, perlu adanya proses penegakan hukum yang baik dengan model sistem peradilan korupsi yang efektif dan efisien berdasarkan asas-asas *good government* dan *good governance* yang dapat berjalan dengan baik, utamanya perlu adanya tindak lanjut dari aturan yang ada. Sehingga salah satu wujud kebijakan aturan pengetatan syarat pemberian remisi koruptor ini dapat menjadi salah satu bentuk penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia.

PENUTUP

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah di uraikan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 1. Pengetatan syarat pemberian remisi koruptor yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan juga UUD NRI Tahun 1945. Pembatasan hak asasi hanya dapat dilakukan dengan Undang-undang dan tidak boleh dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya, sehingga tidak menyalahi aturan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. 2. Implikasi yuridis pengetatan pemberian remisi bagi narapidana korupsi ini terpenuhi maka akan membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan dapat mencegah pelaku korupsi potensial, dengan syarat pengetatan remisi penanggulangan korupsi pun dapat terpenuhi karena uang negara kembali, serta kebijakan pengetatan remisi ini telah mencapai tujuan hukum dengan terpenuhinya rasa keadilan baik bagi masyarakat dan narapidana. Untuk tujuan yang baik dalam sistem pemasyarakatan, kelemahan-kelemahan dalam pengaturan perundang-undangan harus direvisi secara holistik dan komprehensif, sehingga diharapkan implikasi yuridisnya akan memenuhi rasa keadilan dan baik negara maupun masyarakat akan sepenuhnya mencapai tujuan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Barda Nawawi Arief, **Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.

CI Harsono, **Sistem Baru Pembinaan Narapidana**, Djambatan, Jakarta, 1995.

Darwan Prinst, **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002.

Jur. Andi Hamzah, **Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Masdar F. Mas'udi, J. Suyuthi Pulungan, dkk, **Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama, Mewacanakan Fikih Anti Korupsi**, Gama Media, Yogyakarta, 2006.

Romli Atmasasmita, **Korupsi, Good Governance & Komisi Anti Korupsi di Indonesia**, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Press, Jakarta, 2001.

-----, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

Wahyudi Kumorotomo, **Etika Administrasi Negara**, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2011.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pelayaran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4632.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359.

INTERNET

Herwan, **Korupsi dan Dampaknya**, (online), <http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id>, (12 September 2013).